

ketat. Akibatnya muncul keresahan di daerah terhadap komitmen pemerintah pusat untuk melaksanakan desentralisasi.

Di tengah-tengah kondisi tersebut pada pasca Orde Baru untuk menjawab tuntutan otonomi yang lebih baik muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004) tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 (telah direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah. Walaupun Undang-Undang tersebut masih diwarnai dengan beberapa kelemahan dan menjadi sorotan kritis dari masyarakat, namun masih ada rasa optimisme karena makna otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai Januari 2001 menimbulkan reaksi yang berbeda-beda di berbagai daerah. Pemerintah daerah yang memiliki sumber kekayaan alam yang besar menyambut otonomi daerah dengan penuh harapan, sebaliknya daerah yang miskin sumber daya alamnya menanggapinya dengan sedikit rasa khawatir dan was-was.

Kekhawatiran beberapa daerah tersebut bisa dipahami, karena pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kepentingan masyarakat di daerah.

Sasaran pembangunan daerah yaitu: berkembangnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dengan titik berat pada

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Subyek Penelitian

Subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat yang sudah ada sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2003, yaitu terdiri dari 16 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota.

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Dari populasi yang ada, cara pemilihan sampel akan dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam menentukan data pada sampel penelitian, yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Pemilihan data dilakukan dengan cara *purposive* ini dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang representatif berdasarkan kualifikasi yang ditentukan. Adapun kualifikasi yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah kabupaten/kota yang sudah berada di propinsi Jawa Barat dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003 yang terdiri dari 16 pemerintahan kabupaten dan 5 pemerintahan kota.
2. Pemerintah kabupaten/kota yang menyertakan laporan APBD dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2003.

setelah otonomi daerah pemerintah kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat belum mampu melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dari pemerintah pusat dalam mengelola sumber-sumber penerimaan negara.

5.2 Implikasi Penelitian

- Bagi pemerintah pusat dengan adanya otonomi setiap daerah harus mampu mengelola keuangannya sendiri dan dituntut untuk lebih mandiri baik dari sistem pembiayaan maupun dalam menentukan arah pembangunan, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat desentralisasi fiskal setelah otonomi daerah lebih rendah sehingga masih tingginya tingkat ketergantungan dari pusat, ini menandakan tingkat kemandirian pemerintah kabupaten/kota di propinsi Jawa Barat masih relatif rendah. Pemerintah pusat hendaknya memberikan kewenangan atau tanggung jawab pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara kepada Pemerintahan Propinsi bagi pemerintah kabupaten/kota yang tidak mampu atau tidak siap menjalankannya sesuai dengan PP No 25 Tahun 2000.
- Bagi Pemerintah Daerah dengan adanya otonomi daerah harus lebih meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kemampuan pembiayaan dan tingkat desentralisasi fiskal lebih rendah secara signifikan dibandingkan sebelum otonomi